

# **FAKTOR PENENTU PERMINTAAN TENAGA KERJA DI PROVINSI DKI JAKARTA**

**Adhitya Vega Darmawan<sup>1</sup>, Hermien Triyowati<sup>2\*</sup>**

\*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia

hate\_usakti@yahoo.com

## ***Abstract***

*The purpose of this research was to analyzed labor demand in DKI Jakarta. Independent variables that used in this research are GRDP, investment, and wages). While the dependent variable is labor absorption. Some data that were required in this research included the number of labors, data of GRDP, data of investment, and also wages of DKI Jakarta which received from BPS of DKI Jakarta. The data were analyzed by the Error Correction Model (ECM) The result of this research showed that GRDP, investment, and wages had the same influence to labor demand DKI Jakarta. Partially, GRDP had positive and significant influence labor demand in DKI Jakarta. In other hand, wages had a negative and significant influence to labor demand in DKI Jakarta. While investment has no significant effect on labor demand in DKI Jakarta. The influence of GRDP, investment, and wages to labor demand in DKI Jakarta had percentage is 87,39%. While 12,61% was explained by another factor.*

***Keywords: Labor, GRDP, investment, wages, DKI Jakarta***

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia tahun 1997/1998 berdampak negatif terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2010 angka pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,24 juta orang. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menerima persyaratan pemberian bantuan dari IMF dan *World Bank* mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia sepakat dalam keseluruhan kerangka kebijakan ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan berada dalam posisi minor yang harus 'melayani'. Terutama kepentingan investasi dan industri. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama perekonomian, mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh terutama sejak 1997.

Program pembangunan ekonomi Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dengan berbagai kegiatan yang produktif untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Pembangunan ekonomi juga merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan tumbuh dan berkembang, perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan dalam penggunaan teknologi. Sebagai implikasi dari perkembangan ini, maka kesempatan kerja

akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2014:3)

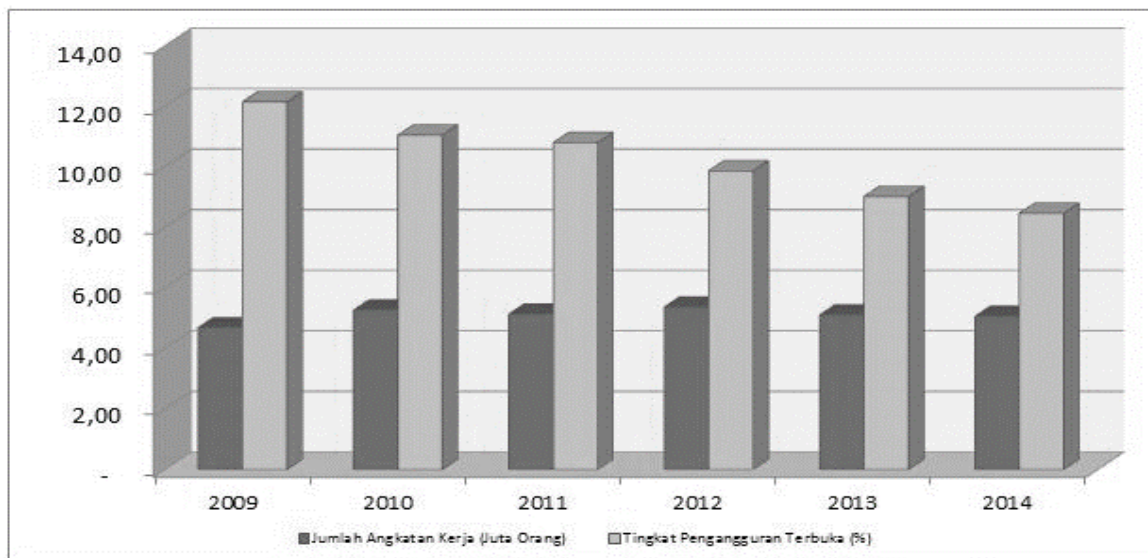
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri. Industrialisasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2006:231). Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dengan demikian, pengertian tentang pembangunan ekonomi menyangkut perubahan kuantitatif pada produksi dan pendapatan.

Proses pembangunan ekonomi diiringi dengan perubahan dalam perubahan struktur ekonomi dari agraris menjadi industri atau jasa. Dalam suatu proses dalam menghasilkan suatu output sumber daya manusia merupakan sarana utama dan pelaksana semua kegiatan untuk mencapai tujuannya. Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun konsumen. Secara teoritis tenaga kerja merupakan energi-energi manusia yang dikerahkan dengan tujuan tertentu yang diketahui dengan sadar. Peran sumber daya

manusia sangat diperhatikan karena kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yang pertama aspek fisik (kualitas fisik) dan yang kedua aspek non fisik (kualitas non fisik) menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan keterampilan-keterampilan lain.

Saat ini, masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan adalah pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tercipta pada setiap sektor sehingga timbulnya masalah pengangguran. Peningkatan penggunaan teknologi membuat kualifikasi menjadi pekerja meningkat, yang berakibat bagi pencari pekerja yang tidak

memenuhi prasyarat akan menjadikan mereka pengangguran baru. Jika pengangguran dapat dikelola dengan baik, pengangguran dapat menjadi tenaga yang profesional dapat menjadi aset berharga bagi bangsa, namun jika pengangguran tidak dikelola secara tepat akan menjadi beban masyarakat masalah pengangguran merupakan tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Buktinya adalah semakin meningkatnya tingkat pengangguran seiring dengan bertambahnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kondisi ekonomi yang lesu sehingga banyak industri yang gulung tikar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 11,9 juta jiwa pengangguran terbuka. Salah satu usaha



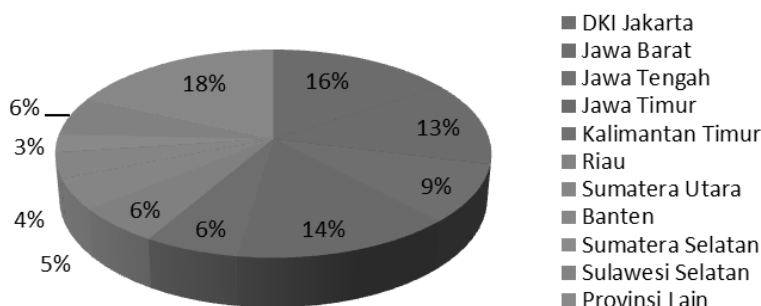
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

**Gambar 1**  
**Perkembangan Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2014**

untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah melalui pembangunan di sektor industri. Pembangunan di sektor industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang untuk memperbaiki struktur ekonomi yang tidak seimbang. Berikut grafik perbandingan angkatan dengan tingkat pengangguran pada periode tersebut. Walaupun tren tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan, namun masih tinggi karena pada tahun 2014 4.285 orang masih belum memiliki pekerjaan.

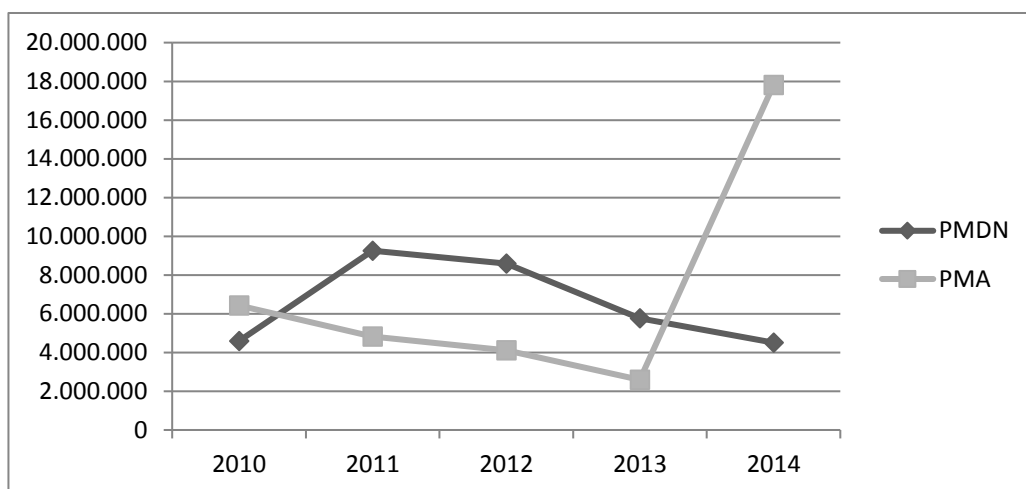
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. Berikut grafik yang menunjukkan distribusi PDRB di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia, buktinya Provinsi DKI Jakarta menyumbang rata-rata 16% dari keseluruhan PDRB Indonesia. Pada tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta menghasilkan 1.761.407 (miliar rupiah) jumlah ini naik sebesar 13,86% dari tahun sebelumnya. Berikut distribusi PDRB di Indonesia. Menurut Sukirno (2010:24) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Arsyad (1999:58) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

**Gambar 2**  
**Distribusi PDRB terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2014 (persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta 2015

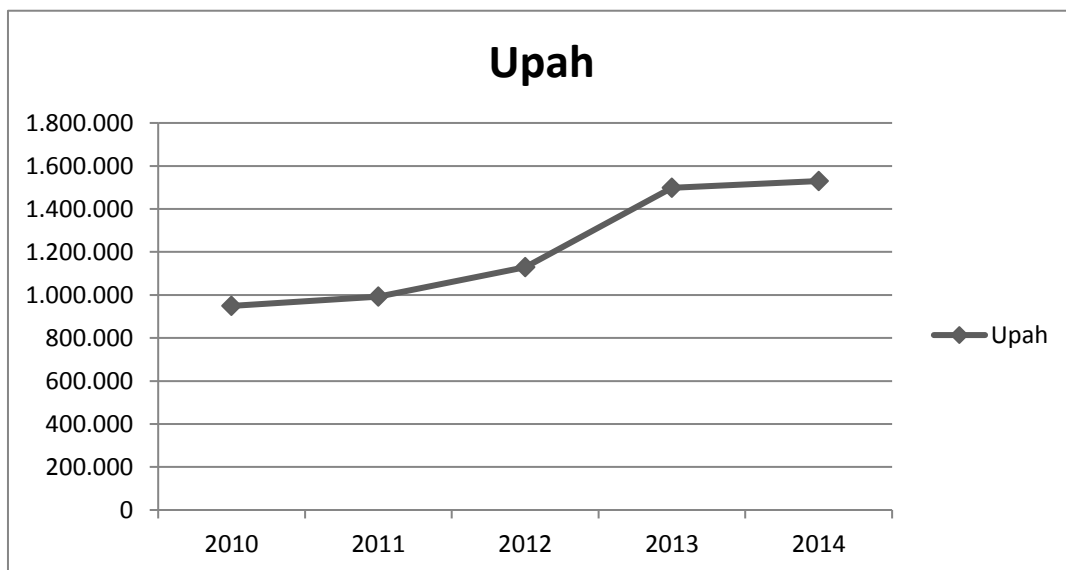
**Gambar 3**  
**Perkembangan PMDN (juta rupiah) dan PMA (ribu dollar) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2014.**

pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan.

Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) di Indonesia memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, justru angka pengangguran meningkat dan kesejahteraan masyarakat menurun.

Pada gambar 3 memperlihatkan bahwa PMDN memiliki tren yang menurun, sedangkan PMA mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2014. Investasi

merupakan salah satu sumber utama dalam melakukan kegiatan produksi. Investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan barang dan jasa. Menurut Sukirno (2010:74) Kegiatan investasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja pada masyarakat, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peningkatan kegiatan investasi akan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Tujuan ini menjadi penting karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan selaras dengan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi juga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta 2015

**Gambar 4**  
**Perkembangan Upah Riil Provinsi DKI Jakarta (rupiah).**

Pada gambar 4 Upah di Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang meningkat pada tahun 2010-2014. Menurut Davanto dan Putu (2011:17) upah adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan para pengusaha dan pekerja memiliki perbedaan pengertian dan kepentingan yang menimbulkan masalah selama ini. Sehingga pemerintah berperan sebagai pembuat

kebijakan untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan output perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, yang akan membuat suatu perusahaan berkembang.

Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan untuk mendukung peningkatan investasi agar penyerapan tenaga kerja meningkat, standar pendapatan untuk kesejahteraan tenaga kerja dan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal.

### Rumusan Masalah

Tingkat permintaan tenaga kerja yang tinggi merupakan faktor penunjang pembangunan nasional. Di Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah tenaga kerja yang cenderung mengalami peningkatan. Diduga Peningkatan tenaga kerja ini disebabkan oleh PDRB, investasi, dan upah. Provinsi DKI Jakarta merupakan yang terbesar dibandingkan di provinsi lain, akan tetapi DKI Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh PDRB, investasi, dan upah terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta?

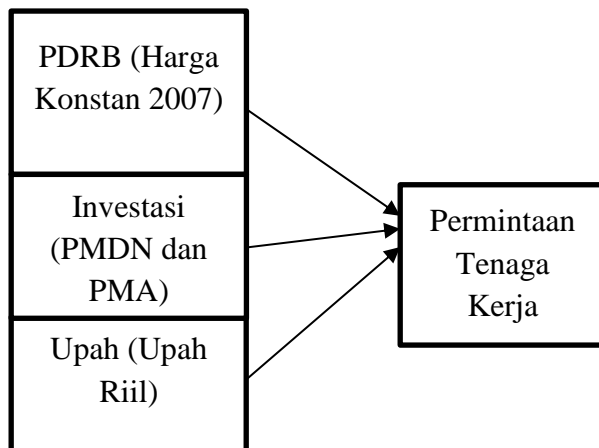
### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis pengaruh PDRB, Investasi dan Upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengestimasi pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengestimasi pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengestimasi pengaruh Upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

### KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas tentang PDRB, investasi, dan upah minimum provinsi di DKI Jakarta maka dapat disusun kerangka pemikiran di bawah ini.



### Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah:

$Ha_1$  : PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

$Ha_2$  : Investasi berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga di Provinsi DKI Jakarta.

$Ha_3$  : Upah berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Permintaan tenaga kerja

Permintaan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sektor unit usaha tertentu. Permintaan tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja usia 15 tahun keatas yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1998-2014. Data diperoleh dari BPS Provinsi DKI Jakarta dari berbagai terbitan yang dinyatakan dalam satuan orang.

Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi maka digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2007 yang diperoleh dari BPS Provinsi DKI Jakarta. Data untuk penelitian ini diambil dari tahun 1991-2014.

#### 2. Investasi (PMDN dan PMA)

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan

memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi PMDN dan PMA yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 1991-2014 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah untuk PMDN, sedangkan PMA menggunakan satuan ribu dollar amerika serikat.

#### 3. Upah

Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Data upah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data upah riil di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991-2014. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dari berbagai terbitan yang dinyatakan dalam rupiah.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM) yang diestimasi dari model OLS (*Ordinary Least Square*). Kemudian, sebelum menggunakan metode ECM ini terdapat beberapa tahap pengujian yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni meliputi uji akar-akar unit, uji derajat integrasi dan uji derajat kointegrasi. Adapun metode analisis yang digunakan untuk mengestimasi model penelitian dua analisis yaitu analisis jangka panjang dengan menggunakan persamaan kointegrasi dan analisis dinamis jangka pendek dengan



menggunakan ECM (*Error Correction Model*). Konsep terkini yang banyak dipakai untuk menguji kestasioneran data runtun waktu adalah uji akar unit (*unit root test*). Jika semua variabel lolos dari uji akar unit, maka selanjutnya dilakukan uji kointegrasi (*cointegration test*) untuk mengetahui kemungkinan terjadinya keseimbangan atau kestabilan jangka panjang diantara variabel-variabel yang diamati.

Adanya keseimbangan dalam jangka panjang dalam suatu model estimasi tidak selalu mencerminkan adanya keseimbangan dalam jangka pendek. Karena dalam jangka pendek, pergerakan dari setiap variabel mungkin saja akan menyimpang dari keseimbangan jangka panjangnya yang diakibatkan oleh faktor ekonomi ataupun faktor non ekonomi. Oleh karenanya sebelum melakukan estimasi ECM, harus dipastikan Y dan X terkointegrasi. Apabila hubungan variabel terkointegrasi, yang berarti dalam jangka panjang akan tercapai kondisi keseimbangan, maka *error* (deviasi) jangka pendek tersebut akan terkoreksi kembali pada keseimbangan jangka panjangnya. Proses koreksi ini secara ekonometrika disebut sebagai mekanisme koreksi kesalahan/*error correction mechanisms* (ECM). Dalam analisis ekonomi, ECM dapat pula dipakai untuk menjelaskan mengapa pelaku ekonomi menghadapi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dalam konteks bahwa fenomena yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang terjadi dan perlunya yang bersangkutan melakukan penyesuaian (*adjustment*) sebagai

akibat adanya perbedaan fenomena aktual yang dihadapi antar waktu. Model persamaannya sebagai berikut:

$$L = a + b \text{ PDRB} + c \text{ PMDN} + d \text{ PMA} + e \text{ Upah} + \varepsilon$$

Keterangan:

L = Tenaga Kerja

a = Konstanta

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PMDN = Penanamam Modal Dalam Negeri

PMA = Penanaman Modal Asing

Upah = Upah Riil

b, c, d, e = Koefisien variabel independen

$\varepsilon$  = Variabel pengganggu

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan alpha sebesar 5%. Pada jangka panjang secara simultan semua variabel independen signifikan mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta tetapi tidak secara parsial. Variabel yang signifikan yaitu PDRB dan upah riil. Sedangkan variabel investasi baik itu PMDN dan PMA tidak signifikan sehingga variabel tersebut tidak bisa dibaca. Seluruh variabel yang digunakan juga memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan, Dimana PDRB, PMDN, dan PMA memiliki pengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja, sedangkan upah memiliki korelasi negatif dengan permintaan tenaga kerja. Namun, variabel investasi baik itu PMDN dan PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap

**Tabel 1**  
**Hasil Estimasi Model Statis (Jangka Panjang)**

Independen	Koefisien	Uji t	Kesimpulan	R-squared
(constant)	3,218031	-	-	
PDRB	0,002697	0,0000	Signifikan	
PMDN	0,005115	0,3913	Tidak Signifikan	0,873919
PMA	0,009617	0,2656	Tidak Signifikan	
UPAH	-1.047084	0,01030	Signifikan	

Ket\* signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Sumber: Data diolah dengan menggunakan *Eviews 6* (lihat pada lampiran)

permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, walaupun memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori.

Nilai konstanta menunjukkan besarnya nilai variabel dependen saat tidak ada berpengaruh dari variabel independen yang digunakan. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa besarnya permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta akan berjumlah sebesar 3,218031% saat tidak berpengaruh dari variabel independen. Besarnya nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,873919 mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan PMDN, PMA, PDRB, dan upah mampu menjelaskan perilaku dari variabel dependen sebesar 87,39% sedangkan sisanya 12,61% perilaku dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam model. Dari hasil estimasi jangka panjang diatas dapat diartikan bahwa pada kasus permintaan Provinsi DKI Jakarta. Hasil regresi menunjukkan bahwa:

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari regresi nilai probabilitas yang telah dibagi dua sebesar  $(0,00) < (0,05)$  maka

kesimpulannya adalah hipotesa nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hasil dari uji t tersebut menyatakan bahwa PDRB di Provinsi DKI Jakarta berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja serta signifikan secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. PDRB memberikan pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 0,002697 terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991-2014. Peningkatan PDRB sebesar Rp 1 triliun akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja sebesar 2.697 orang.

Hasil regresi yang diperoleh nilai probabilitas PMDN yang telah dibagi dua sebesar  $(0,39135) > (0,05)$ , dan nilai probabilitas PMA yang telah dibagi dua sebesar  $(0,26565) > (0,05)$  maka kesimpulan dari dua variabel ini adalah hipotesis alternatif ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Hasil dari uji t tersebut menyatakan bahwa investasi (PMDN dan PMA) yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

permintaan tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. PMDN dan PMA yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991-2014.

Dari hasil regresi diketahui bahwa upah memberikan pengaruh negatif dan signifikan sebesar  $-0.003787$  terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991-2014. Peningkatan upah sebesar Rp 1 juta akan menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 3.787 orang.

### Hasil Uji Kointegrasi

Setelah dilakukan uji stasioneritas data pada seluruh variabel dan diyakini bahwa seluruh variabel tersebut sudah stasioner dan memiliki derajat yang sama, maka selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang dari model tersebut. Koefisien yang menjadi kunci dalam menentukan apakah model ECM tersebut sesuai dengan spesifikasi dan syarat kesahihan, yaitu variabel ECT (*Error Correction Term*), perlu dilihat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pengujian berikutnya. Jika nilai koefisien ECT menunjukkan signifikansi pada tingkat kepercayaan 95% (5%) dan menunjukkan tanda positif yang terletak pada  $0 < ECT < 1$ , maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan yang

digunakan memenuhi syarat kesahihan suatu model dinamis ECM. Secara umum semua hasil estimasi ECM diatas menunjukkan bahwa model yang digunakan telah memenuhi kriteria kesahihan spesifikasi model ECM. Hasil Persamaan I memperlihatkan nilai ECT sebesar 0,05 dengan nilai probabilitas 0,0000 menandakan bahwa model persamaan tersebut memenuhi kriteria spesifikasi model ECM yang sah.

Pada jangka pendek secara simultan semua variabel signifikan mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta tetapi tidak secara parsial. Variabel yang signifikan yaitu PDRB dan upah sedangkan variabel investasi baik itu PMDN dan PMA tidak signifikan sehingga variabel tersebut tidak dapat dibaca. Variabel PDRB, PMA, dan upah memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis, sedangkan variabel PMDN arah korelasi tidak sesuai dengan teori dan hipotesis. Dimana PDRB, dan PMA memiliki pengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi Jakarta. Sedangkan PMDN dan upah berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga di Provinsi DKI Jakarta. Namun variabel investasi baik itu PMDN dan PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dalam jangka pendek.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari regresi nilai probabilitas yang telah dibagi dua sebesar  $(0.0019) < (0,05)$  maka kesimpulannya adalah hipotesa nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ )

**Tabel 2**  
**Hasil Estimasi Model Dinamis (Jangka Pendek)**

Independen	Koefisien	Uji t	Kesimpulan	R-squared
(constant)	-16780.74	-	-	
PDRB	0,002495	0,0019	Signifikan	
PMDN	-0,011779	0,151	Tidak Signifikan	0.559600
PMA	0,003299	0,37475	Tidak Signifikan	
UPAH	-0,745053	0,0349	Signifikan	
ECT(-1)	-1,145266	0,00005	Signifikan	

Ket\* signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Sumber: Data diolah dengan menggunakan *Eviews 6* (lihat pada lampiran)

diterima. Hasil dari uji t tersebut menyatakan bahwa PDRB di Provinsi DKI Jakarta berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja serta signifikan secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil regresi diketahui bahwa PDRB memberikan pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 0.002495 terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991-2014. Peningkatan PDRB sebesar Rp 1 triliun akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja sebesar 2.495 orang.

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari regresi nilai probabilitas PMDN yang telah dibagi dua sebesar (0.151) > (0,05), dan nilai probabilitas PMA yang telah dibagi dua sebesar (0.37475) > (0,05) maka kesimpulan dari dua variabel ini adalah hipotesa nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Hasil dari uji t tersebut

menyatakan bahwa investasi (PMDN dan PMA) yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil regresi diketahui bahwa investasi baik itu PMDN dan PMA yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991-2014. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari regresi nilai probabilitas yang telah dibagi dua sebesar (0.00005) < (0,05) maka kesimpulannya adalah hipotesa nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hasil dari uji t tersebut menyatakan bahwa upah di Provinsi DKI Jakarta berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja serta signifikan secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah berpengaruh

nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil regresi diketahui bahwa upah memberikan pengaruh negatif dan signifikan sebesar  $-0.745053$  terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1991-2014. Peningkatan upah sebesar Rp 100 ribu akan menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 74.505 orang.

PDRB yang cenderung memiliki tren positif di Provinsi DKI Jakarta selama periode pengamatan memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Berdasarkan hasil estimasi selama tahun pengamatan tahun 1991-2014 memperlihatkan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Berdasarkan hasil uji t pada jangka panjang dan pendek diperoleh hasil bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja. Hal ini menjelaskan PDRB sangat mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya hasil tersebut yaitu adanya pengaruh PDRB terhadap permintaan tenaga kerja secara signifikan tersebut sesuai dengan teori "*semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu sektor, maka semakin tinggi pertumbuhan kesempatan kerja suatu sektor*" (Tambunan, 2001:17) Adanya peningkatan pertumbuhan PDRB diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak barang dan jasa yang

dihasilkan maka akan meningkatkan kesempatan kerja.

Selama periode pengamatan perkembangan investasi di Provinsi DKI Jakarta cenderung fluktuatif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman yang salah satu tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil uji t pada jangka panjang dan pendek diperoleh keterangan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa investasi baik itu PMDN dan PMA yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta mengarah pada investasi padat modal. Dengan adanya hasil tersebut yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan pernyataan bahwa "*kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat*" (Sukirno, 2010:72). Dengan hasil tersebut asumsi awal investasi yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta cenderung mengarah investasi padat modal.

Pelaksanaan otonomi daerah beserta adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, Penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah untuk menahan merosotnya tingkat upah, khususnya bagi buruh.

Hasil estimasi selama periode pengamatan pada jangka panjang dan pendek menunjukkan bahwa upah mempunyai pengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, hasil ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat upah akan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel upah berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan oleh dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh negatif antara upah dengan permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan pernyataan "*kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta*" (Kuncoro, 2002:57). Peningkatan upah yang ditetapkan pemerintah akan membuat penurunan tenaga kerja yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta baik jangka pendek maupun jangka panjang, sementara itu variabel investasi tidak berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dalam jangka pendek namun signifikan dalam

jangka panjang. Variabel upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi pada saat tingkat upah naik maka akan menurunkan jumlah tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan peneliti antara lain:

1. Mendorong peningkatan hasil dari barang dan jasa, karena variabel PDRB terbukti secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu akan terjadi pertumbuhan ekonomi disertai dengan tingkat kesejahteraan yang membaik.
2. Mendorong penciptaan investasi disertai dengan kebijakan yang mendukung iklim investasi karena investasi seharusnya sebagai faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah hendaknya mengkaji kembali kebijakan investasi, dengan kondisi banyaknya angka pengangguran seharusnya kebijakan investasi condong pada investasi padat karya.
3. Kebijakan penetapan upah minimum provinsi merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Sebaiknya pemerintah mengkaji kembali besaran tingkat upah minimum provinsi dengan disertai pertimbangan tingkat kesejahteraan agar tidak menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Assauri, Sofjan. 2004. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bellente, Don dan Jackson, Mark. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia.
- BPS DKI Jakarta. 2001. *DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2000*. Jakarta: BPS DKI Jakarta, Available online at <http://www.jakarta.bps.go.id>
- \_\_\_\_\_. 2006. *DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2015*. Jakarta: BPS DKI Jakarta, Available online at <http://www.jakarta.bps.go.id>
- \_\_\_\_\_. 2011. *DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2010*. Jakarta: BPS DKI Jakarta, Available online at <http://www.jakarta.bps.go.id>
- \_\_\_\_\_. 2014. *DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2013*. Jakarta: BPS DKI Jakarta, Available online at <http://www.jakarta.bps.go.id>
- Devanto dan Putu. 2011. *Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan*. Malang: Brawijaya.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan, dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Ehrenberg. Ronald G., dan Smith, Robert. 2003. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. New York City: Pearson Education.
- Gujarati, Damodar. 2004. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Kennedy, Peter. 2003. *A Guide to Econometrics*. Massachusetts: MIT Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Sarwono, Jonathan. 2005. *Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Setiyadi, Heru. 2008. *Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Konveksi (Studi Kasus Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Simanjuntak, Payaman. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya*. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: YKPN.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1998. *Penetapan Sasaran Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja*. Yogyakarta: PAU Studi Ekonomi UGM.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, M.P. dan Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. 1995. *Teori Struktural Modal*. Jakarta: Jurnal Manajemen.
- Yani, Ahmad. 2011. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zamrowi, M.Taufik. 2007. *Analisis Penyerapan Tenaga Pada Industri Kecil Studi di Industri Kecil Mebel Semarang*. Semarang: FE Universitas Diponegoro. Semarang: FE Universitas Diponegoro